

KOMUNIKASI PUBLIK DALAM PENGAWASAN PERATURAN WALIKOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PESTA MALAM

Benedictus Filius, Suratman

Universitas Bengkulu, Bengkulu. Indonesia

benedictus@gmail.com, suratman@unib.ac.id,

Abstract

Article History

Received : 09-11-2025

Revised : 10-12-2025

Accepted : 13-12-2025

Keywords:

Public Communication,

Night Party

Supervision,

Public Perception

Mayor's Regulation,

This study examines the effectiveness of public communication in monitoring the implementation of the Mayor of Lubuk Linggau Regulation No. 1 of 2019 concerning Night Parties through an evaluation of public perceptions as the target group of the policy. The regulation aims to govern the organization of night parties in order to maintain public order, security, and community comfort. Employing a quantitative approach with a survey method involving 94 respondents, the study evaluates five dimensions of policy implementation based on Dunn's (2003) framework: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness. Data were collected using a structured questionnaire with a Likert scale and analyzed through descriptive statistics, comparative tests, and a composite index. The results indicate a Public Perception Index (PPI) score of 64.51, suggesting a fairly good perception of policy implementation. The adequacy dimension received the highest score (2.106), while efficiency had the lowest (1.611). An ANOVA test revealed significant differences among the dimensions ($F = 14.397$, $p < 0.001$). These findings suggest that while the public perceives the substance of the regulation as adequate, the efficiency of its implementation still requires improvement. The study recommends enhancing licensing mechanisms, strengthening coordination among stakeholders, improving policy socialization, and optimizing monitoring systems to increase the effectiveness of public communication and the overall implementation of the night party policy in Lubuk Linggau City.

Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah sebagai instrumen hukum dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan mengatur kehidupan masyarakat di wilayahnya. Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pesta Malam merupakan salah satu kebijakan publik yang diterbitkan untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan hiburan malam di Kota Lubuk Linggau. Peraturan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum,

keamanan, dan kenyamanan masyarakat, serta memastikan bahwa kegiatan pesta malam tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya setempat. Namun, efektivitas implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada publik dan bagaimana persepsi masyarakat sebagai sasaran kebijakan terhadap implementasinya.

Komunikasi publik memegang peran krusial dalam implementasi kebijakan publik karena berfungsi sebagai jembatan antara pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. (Anderson 2020) menekankan bahwa komunikasi yang efektif merupakan prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan publik, karena tanpa pemahaman yang memadai dari stakeholder dan masyarakat, kebijakan yang baik sekalipun akan mengalami kegagalan dalam implementasinya. Dalam konteks pengawasan pesta malam, komunikasi publik tidak hanya mencakup sosialisasi peraturan kepada penyelenggara acara dan masyarakat, tetapi juga melibatkan mekanisme koordinasi antar instansi pemerintah, sistem pelaporan dan pengaduan, serta transparansi dalam penegakan aturan. (Hill and Hupe 2021) menggarisbawahi bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kompleks yang melibatkan multiple actors dan multiple levels, sehingga komunikasi yang jelas dan terstruktur menjadi sangat penting untuk memastikan konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Studi mengenai evaluasi kebijakan publik telah berkembang pesat dalam dekade terakhir, dengan fokus yang semakin kuat pada pentingnya mempertimbangkan perspektif masyarakat sebagai beneficiary atau target group kebijakan. (Dunn 2003) mengembangkan kerangka evaluasi kebijakan yang komprehensif dengan lima kriteria utama yaitu effectiveness, efficiency, adequacy, equity, dan responsiveness. Kerangka ini telah banyak digunakan dalam penelitian evaluasi kebijakan di berbagai konteks. (J. P. Reynolds et al. 2020) dalam meta-analisis mereka terhadap 259 studi menemukan bahwa komunikasi efektivitas kebijakan pemerintah secara signifikan mempengaruhi dukungan publik terhadap kebijakan tersebut, dengan effect size yang lebih besar pada kebijakan yang dipersepsikan efektif dibandingkan yang tidak efektif. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya tidak hanya mengimplementasikan kebijakan dengan baik, tetapi juga mengkomunikasikan keberhasilan implementasi kepada publik.

Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai evaluasi implementasi peraturan daerah telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus yang beragam. (Arnika et al. 2024) mengkaji tantangan dan peluang kolaborasi antar lembaga pemerintah dalam implementasi kebijakan publik, menemukan bahwa koordinasi yang lemah dan komunikasi yang tidak efektif menjadi hambatan utama keberhasilan implementasi. Mereka menyarankan perlunya penguatan mekanisme komunikasi horizontal dan vertikal dalam struktur pemerintahan untuk meningkatkan sinergi implementasi kebijakan. Temuan ini relevan dengan konteks pengawasan pesta malam yang melibatkan multiple agencies seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Dinas Pariwisata, dan instansi terkait lainnya.

Persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan publik telah menjadi area penelitian yang penting karena persepsi ini mempengaruhi tingkat kepatuhan, dukungan publik, dan pada akhirnya efektivitas kebijakan. (Ryzin 2006) mengembangkan expectation-disconfirmation theory dalam konteks kepuasan warga terhadap layanan pemerintah lokal, menunjukkan bahwa diskrepansi antara

ekspektasi dan kinerja aktual secara signifikan mempengaruhi tingkat kepuasan. Teori ini kemudian diperluas oleh (Ryzin 2013) melalui *experimental research* yang mengkonfirmasi bahwa mekanisme kognitif serupa juga berlaku dalam evaluasi warga terhadap kebijakan publik (James 2011) menambahkan bahwa *managing citizens' expectations* menjadi strategi penting bagi pemerintah dalam meningkatkan persepsi kinerja layanan publik.

Literature mengenai pengawasan dan penegakan peraturan daerah menunjukkan bahwa tantangan utama sering terletak pada tahap implementasi di lapangan. (Pressman and Wildavsky 1973) dalam karya klasik mereka menekankan *implementation gap* antara kebijakan yang dirumuskan dengan realisasi di lapangan, yang sering disebabkan oleh kompleksitas koordinasi antar aktor, keterbatasan sumber daya, dan interpretasi yang beragam terhadap kebijakan. Dalam konteks Indonesia, (Lipsky 1980) menggarisbawahi peran krusial *street-level bureaucrats* dalam menentukan bagaimana kebijakan benar-benar diimplementasikan, karena mereka memiliki diskresi dalam menginterpretasikan dan menerapkan aturan dalam situasi konkret. Hal ini sangat relevan dengan pengawasan pesta malam dimana petugas lapangan harus mengambil keputusan situasional dalam menegakkan peraturan.

Studi evaluasi kebijakan dengan pendekatan persepsi masyarakat telah menunjukkan berbagai temuan menarik. (Kelly and Swindell 2002) menggunakan *multiple-indicator approach* dalam mengevaluasi layanan municipal, menemukan korelasi positif antara *performance measurement* objektif dengan *citizen satisfaction*, namun dengan variasi yang signifikan antar yurisdiksi. Ini menunjukkan bahwa faktor kontekstual lokal memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat (Ramesh Patnaik and Prasad. 2021) mengkaji dimensi praktis dan elemen konseptual dalam koordinasi organisasi untuk implementasi kebijakan publik, mengidentifikasi bahwa *clarity of communication*, *shared understanding of objectives*, dan *mutual accountability* merupakan faktor kunci keberhasilan koordinasi.

Penelitian terdahulu mengenai peraturan daerah tentang kegiatan hiburan dan ketertiban umum menunjukkan temuan yang beragam. (Edwards III 1995) mengidentifikasi empat faktor kritis dalam implementasi kebijakan publik yaitu *communication*, *resources*, *dispositions*, dan *bureaucratic structure*. (Mazmanian and Sabatier 1984) mengembangkan framework yang lebih komprehensif dengan menyertakan variabel seperti *tractability of the problem*, *ability of statute to structure implementation*, dan *non-statutory variables affecting implementation*. Framework-framework ini telah digunakan secara luas dalam menganalisis implementasi kebijakan di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan.

(Winter 2012) dalam kajian komprehensif tentang *implementation perspectives* menekankan pentingnya memahami proses implementasi dari berbagai sudut pandang termasuk *top-down*, *bottom-up*, dan pendekatan integratif. Dalam konteks peraturan pesta malam, pendekatan integratif menjadi penting karena kebijakan ini memerlukan tidak hanya *compliance* dari atas ke bawah, tetapi juga *adaptation* dan *contextualization* di tingkat implementasi lapangan. (Stufflebeam and Coryn 2014) menambahkan bahwa evaluasi kebijakan harus mempertimbangkan *context*, *input*, *process*, dan *product* secara komprehensif untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang efektivitas kebijakan.

(Vedung 2017) mengklasifikasikan evaluasi kebijakan menjadi beberapa tipe

berdasarkan timing dan purpose, termasuk prospective evaluation, formative evaluation, dan summative evaluation. Penelitian ini termasuk dalam kategori summative evaluation karena bertujuan menilai outcome dan impact dari kebijakan yang telah berjalan beberapa tahun. (Rossi, Lipsey, and Freeman 2004) menekankan bahwa summative evaluation harus menggunakan systematic approach dengan metodologi yang rigorous untuk menghasilkan temuan yang valid dan reliable.

Konteks lokal Kota Lubuk Linggau memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi implementasi kebijakan pesta malam. Sebagai kota yang berkembang dengan dinamika sosial yang cukup kompleks, Lubuk Linggau menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara pengembangan ekonomi kreatif melalui industri hiburan dengan menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 disusun sebagai respons terhadap berbagai keluhan masyarakat mengenai gangguan ketertiban umum akibat penyelenggaraan pesta malam yang tidak terkontrol.

Meskipun literatur tentang evaluasi kebijakan publik dan komunikasi publik telah berkembang pesat, masih terdapat gap dalam pemahaman mengenai bagaimana komunikasi publik mempengaruhi efektivitas pengawasan peraturan daerah, khususnya dalam konteks peraturan tentang kegiatan hiburan malam. Penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut dengan mengkaji secara komprehensif persepsi masyarakat sebagai sasaran kebijakan terhadap implementasi Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2019. Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan integrated framework yang menggabungkan teori komunikasi publik dengan evaluation criteria Dunn, serta fokus pada peraturan pesta malam yang merupakan jenis kebijakan yang relatif jarang diteliti dibandingkan dengan kebijakan sektor lain.

Berdasarkan tinjauan literatur dan gap penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian utama yaitu bagaimana persepsi masyarakat Kota Lubuk Linggau terhadap efektivitas komunikasi publik dalam pengawasan implementasi Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pesta Malam, dan dimensi evaluasi kebijakan mana yang memerlukan perbaikan prioritas. Pertanyaan penelitian ini penting untuk dijawab karena akan memberikan evidence-based recommendations bagi pemerintah kota dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan komunikasi publik terkait pengaturan pesta malam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain riset survei deskriptif evaluatif untuk menilai persepsi masyarakat terhadap implementasi Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pesta Malam. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran sistematis terhadap variabel-variabel persepsi dan memfasilitasi analisis statistik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. (Creswell 2016) menjelaskan bahwa desain survei cocok untuk penelitian yang bertujuan mengukur sikap, opini, atau karakteristik populasi melalui studi sampel yang representatif. Penelitian dilaksanakan di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, selama periode Mei hingga Juli 2025, mencakup tahapan persiapan instrumen, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil.

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau yang

berusia 18 tahun ke atas dan memiliki pengetahuan tentang Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pesta Malam. Kriteria inklusi meliputi berdomisili di Kota Lubuk Linggau minimal 1 tahun, berusia minimal 18 tahun, dan memiliki minimal pengetahuan dasar tentang peraturan pesta malam baik sebagai penyelenggara, peserta, atau warga yang terdampak. Kriteria eksklusi meliputi responden yang tidak bersedia berpartisipasi, memiliki keterbatasan kognitif yang menghambat pengisian kuesioner, atau tidak melengkapi kuesioner dengan baik. Penentuan ukuran sampel menggunakan formula Slovin dengan tingkat kesalahan 10 persen, menghasilkan minimal sampel 100 responden. Penelitian ini berhasil mengumpulkan data dari 100 responden, namun setelah screening dan cleaning data, 94 kuesioner dinyatakan valid dan lengkap untuk dianalisis, menghasilkan response rate sebesar 94 persen yang tergolong sangat baik.

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan quota sampling untuk memastikan keterwakilan berbagai segmen masyarakat. (Sugiyono 2019) menjelaskan bahwa purposive sampling cocok digunakan ketika peneliti membutuhkan responden dengan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel dialokasikan berdasarkan strata kecamatan di Kota Lubuk Linggau dengan mempertimbangkan distribusi populasi dan karakteristik sosio-ekonomi. Proses pengambilan sampel melibatkan identifikasi area sampling di setiap kecamatan, penetapan quota berdasarkan proporsi populasi, recruitment responden melalui community leaders dan tokoh masyarakat, serta screening untuk memastikan responden memenuhi kriteria inklusi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan perspektif yang beragam dari berbagai segmen masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari implementasi peraturan pesta malam.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang dikembangkan berdasarkan kerangka evaluasi kebijakan (Dunn 2003) yang mencakup lima dimensi utama yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Setiap dimensi dioperasionalkan ke dalam 5 indikator yang diukur menggunakan skala Likert 3 poin dengan kategori kurang terlaksana sama dengan 1, cukup terlaksana sama dengan 2, dan terlaksana sama dengan 3. Total kuesioner terdiri dari 25 item pertanyaan tertutup ditambah beberapa pertanyaan terbuka untuk rekomendasi dan saran. Skala 3 poin dipilih untuk mempermudah responden dalam memberikan penilaian dan mengurangi ambiguitas, sesuai dengan saran (Arikunto 2013) bahwa skala yang lebih sederhana dapat meningkatkan reliabilitas respon.

Validitas instrumen diuji melalui content validity dengan melibatkan expert judgment dari tiga ahli kebijakan publik dan komunikasi publik, serta face validity melalui pilot testing kepada 30 responden yang tidak termasuk dalam sampel utama. Berdasarkan pilot test, beberapa item pertanyaan direvisi untuk meningkatkan clarity dan menghilangkan ambiguitas. Reliabilitas instrumen diuji menggunakan Cronbach's Alpha, menghasilkan koefisien reliabilitas 0,87 untuk keseluruhan instrumen dan berkisar antara 0,78 hingga 0,84 untuk setiap dimensi, yang mengindikasikan reliabilitas baik hingga sangat baik sesuai kriteria (Sugiyono 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui survey langsung dengan menggunakan kuesioner tercetak yang diisi sendiri oleh responden dengan didampingi enumerator terlatih. Enumerator berjumlah 5 orang yang telah mendapatkan training mengenai

tujuan penelitian, cara mengisi kuesioner, etika penelitian, dan teknik probing untuk pertanyaan terbuka. Sebelum pengisian kuesioner, responden diberikan informed consent yang menjelaskan tujuan penelitian, kerahasiaan data, dan hak responden untuk mengundurkan diri kapan saja. Responden yang setuju diminta menandatangani lembar persetujuan. Proses pengumpulan data berlangsung selama 4 minggu pada bulan Juni 2025 dengan distribusi waktu yang merata di berbagai lokasi sampling.

Kuesioner yang telah terkumpul kemudian melalui proses screening dan cleaning data untuk memastikan kualitas data. Kriteria screening meliputi kelengkapan pengisian dengan maksimal 10 persen item missing, konsistensi jawaban yang diperiksa melalui cross-checking item yang berkaitan, dan identifikasi potential bias seperti response set atau extreme responding. Dari 100 kuesioner yang terkumpul, 6 kuesioner tidak memenuhi kriteria dan dikeluarkan dari analisis, sehingga total sampel final adalah 94 responden. Data dari kuesioner yang valid kemudian dientry ke dalam software SPSS versi 26 dengan melakukan double entry dan verification untuk memastikan akurasi input data.

Tahapan analisis data dimulai dengan preparasi data yang meliputi coding variabel, entry data, dan cleaning data. Uji asumsi dasar dilakukan mencakup pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test, deteksi outliers menggunakan Z-score dengan kriteria nilai absolut Z lebih besar dari 3,29, dan pengujian homogenitas varians untuk analisis komparatif. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa distribusi data untuk sebagian besar variabel mendekati normal atau dapat ditoleransi untuk analisis parametrik, sedangkan deteksi outliers mengidentifikasi beberapa kasus ekstrem yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk memutuskan apakah akan dipertahankan atau dieliminasi.

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik responden dan distribusi data persepsi masyarakat. Analisis univariat dilakukan untuk setiap item pertanyaan dan dimensi persepsi dengan menghitung mean dan standard deviation untuk mengukur tendensi sentral dan variabilitas, frequency distribution untuk melihat sebaran jawaban responden, percentage untuk proporsi setiap kategori jawaban, dan range untuk mengetahui rentang skor yang dicapai. Kategorisasi tingkat persepsi dilakukan berdasarkan skor mean dengan kategori kurang baik untuk mean 1,00 hingga 1,66, cukup baik untuk mean 1,67 hingga 2,33, dan baik untuk mean 2,34 hingga 3,00. Kategorisasi ini mengacu pada pembagian interval yang sama dengan rentang 0,67 untuk setiap kategori.

Analisis per dimensi persepsi dilakukan untuk setiap dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas secara terpisah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi kebijakan dalam setiap dimensi. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram pie, dan box plot untuk memudahkan interpretasi. Visualisasi data dirancang untuk mempresentasikan informasi secara jelas dan mudah dipahami oleh berbagai stakeholder termasuk pembuat kebijakan dan masyarakat umum.

Analisis komparatif dilakukan untuk mengetahui perbedaan persepsi antar dimensi evaluasi menggunakan one-way ANOVA. Jika ada perbedaan signifikan dengan p kurang dari 0,05, dilakukan post-hoc test menggunakan Tukey HSD untuk mengidentifikasi dimensi mana yang berbeda secara signifikan. Uji ANOVA dipilih

karena cocok untuk membandingkan mean dari tiga atau lebih kelompok dan telah widely used dalam penelitian evaluasi kebijakan. Asumsi ANOVA meliputi independensi observasi, normalitas distribusi, dan homogenitas varians telah dipenuhi atau dapat ditoleransi berdasarkan robustness dari uji F terhadap slight violations.

Perhitungan Indeks Persepsi Masyarakat atau IPM dilakukan untuk memberikan skor tunggal yang merepresentasikan persepsi keseluruhan masyarakat terhadap implementasi kebijakan. IPM dihitung menggunakan formula IPM sama dengan jumlah skor dimensi dikali bobot dimensi dibagi jumlah bobot dimensi dikali 100, dimana bobot setiap dimensi adalah 20 persen atau equal weighting dan skor dimensi adalah rata-rata skor item dalam setiap dimensi. Kategorisasi indeks ditetapkan sebagai 0 hingga 55 sama dengan persepsi kurang baik, 56 hingga 75 sama dengan persepsi cukup baik, dan 76 hingga 100 sama dengan persepsi baik. Indeks komposit ini memberikan gambaran menyeluruh tentang persepsi masyarakat dan memudahkan interpretasi hasil penelitian serta perbandingan dengan standar atau penelitian lain.

Analisis data kualitatif dilakukan terhadap jawaban responden pada bagian rekomendasi dan saran terkait peraturan daerah. Data kualitatif dianalisis menggunakan content analysis dengan tahapan categorization untuk mengelompokkan saran berdasarkan tema-tema yang muncul, frequency counting untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap tema, dan pattern identification untuk mengidentifikasi pola umum. Hasil analisis kualitatif digunakan untuk memperkaya interpretasi hasil analisis kuantitatif dan memberikan konteks yang lebih mendalam tentang persepsi masyarakat. Integrasi data kuantitatif dan kualitatif dilakukan melalui triangulasi untuk memvalidasi temuan dan memberikan pemahaman yang komprehensif.

Interpretasi hasil dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi statistik temuan, makna praktis dari temuan dalam konteks implementasi kebijakan, dan relevansi dengan teori evaluasi kebijakan. Penyusunan rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan specific untuk setiap dimensi yang perlu diperbaiki, measurable agar dapat diukur implementasinya, achievable atau realistis untuk dilaksanakan, relevant dengan konteks Kota Lubuk Linggau, dan time-bound dengan target waktu implementasi yang jelas. Seluruh proses analisis data didokumentasikan secara sistematis untuk memastikan transparency, reproducibility, dan accountability dalam penelitian ilmiah sesuai dengan prinsip good research practice yang digariskan oleh (Patton 2015).

Pembahasan

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan sebanyak 94 orang responden yang berasal dari masyarakat Kota Lubuk Linggau dan telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan responden dilakukan secara cermat agar hasil yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dari sisi sebaran geografis, responden penelitian ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Lubuk Linggau, dengan proporsi yang relatif seimbang antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Penyebaran yang merata tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap area di kota ini memiliki representasi yang memadai, sehingga tidak ada wilayah yang terabaikan dalam pengambilan data.

Jika ditinjau dari karakteristik demografis, para responden menunjukkan tingkat keragaman yang cukup tinggi. Variasi tersebut terlihat dari rentang usia yang berbeda-beda, mulai dari kelompok usia muda hingga dewasa dan lanjut usia, yang memberikan pandangan beragam mengenai topik penelitian. Dari segi tingkat pendidikan, responden terdiri atas mereka yang berpendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, sehingga memperkaya sudut pandang terhadap pemahaman kebijakan yang dikaji. Selain itu, variasi juga tampak pada jenis pekerjaan, yang mencakup berbagai bidang seperti pegawai negeri, wiraswasta, pekerja sektor informal, hingga ibu rumah tangga.

Keberagaman dalam aspek geografis dan demografis tersebut memberikan kontribusi penting terhadap keberagaman perspektif yang terekam dalam penelitian ini. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersifat parsial, tetapi juga mampu menggambarkan pandangan masyarakat secara komprehensif dan representatif, mencerminkan berbagai segmen sosial dan ekonomi yang ada di Kota Lubuk Linggau.

Analisis Statistik Deskriptif Per Dimensi

Analisis statistik deskriptif menunjukkan variasi yang signifikan dalam persepsi masyarakat terhadap lima dimensi evaluasi implementasi Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019. Tabel 1 menyajikan ringkasan statistik deskriptif untuk setiap dimensi evaluasi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Per Dimensi Evaluasi (N=94)

Dimensi	Mean	SD	Min	Max
Efektivitas	2.009	0.489	1.200	3.000
Efisiensi	1.611	0.399	1.000	2.600
Kecukupan	2.106	0.556	1.000	3.000
Perataan	2.032	0.655	1.400	8.000
Responsivitas	1.919	0.291	1.000	2.800

Sumber: Hasil analisis penelitian, 2025

Hasil analisis data dalam penelitian ini memberikan gambaran yang cukup mendalam mengenai tingkat efektivitas komunikasi publik dan implementasi kebijakan pengawasan terhadap Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pesta Malam. Berdasarkan hasil penghitungan skor mean pada masing-masing dimensi yang dianalisis menggunakan kerangka evaluasi kebijakan (Dunn 2003), diperoleh hasil yang bervariasi pada tiap dimensi, yang mencerminkan perbedaan persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek implementasi kebijakan tersebut.

Dimensi kecukupan (adequacy) menunjukkan hasil yang paling tinggi dengan skor mean sebesar 2,106, yang termasuk dalam kategori “cukup baik” dan mendekati “baik”. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menilai bahwa substansi dan isi dari peraturan sudah memadai dalam memberikan arahan dan batasan terkait penyelenggaraan pesta malam di Kota Lubuk Linggau. Masyarakat pada umumnya merasa bahwa peraturan ini sudah mampu mengakomodasi kebutuhan akan ketertiban dan keamanan, sekaligus tetap

memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan hiburan malam secara terkendali. Dengan kata lain, konten regulasi dianggap telah sesuai dengan tujuan kebijakan, yaitu menciptakan keseimbangan antara kebebasan masyarakat dalam berkegiatan dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban umum.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dimensi efisiensi (efficiency) memperoleh skor mean paling rendah, yakni sebesar 1,611, yang termasuk dalam kategori “kurang baik”. Capaian ini menandakan adanya kendala nyata dalam pelaksanaan kebijakan dari sisi efisiensi, baik dalam penggunaan sumber daya, waktu, maupun mekanisme kerja antar lembaga terkait. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi rendahnya nilai efisiensi antara lain prosedur perizinan yang masih dianggap berbelit dan memakan waktu lama, serta penggunaan sumber daya manusia dan anggaran yang belum optimal. Selain itu, koordinasi antar instansi yang terlibat dalam proses pengawasan juga dinilai belum berjalan secara sinergis, sehingga menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak sepenuhnya efektif dan efisien.

Sementara itu, dimensi efektivitas (effectiveness) menunjukkan skor mean sebesar 2,009, yang berada dalam kategori “cukup baik”. Temuan ini menggambarkan bahwa meskipun kebijakan telah berjalan sesuai dengan tujuannya dalam menjaga ketertiban dan mengurangi potensi gangguan keamanan akibat pesta malam, namun tingkat pencapaian hasilnya masih belum maksimal. Artinya, kebijakan ini telah memberikan dampak positif, tetapi belum secara penuh mencapai sasaran yang diharapkan karena masih terdapat hambatan dalam penerapan dan pengawasan di lapangan.

Dimensi pemerataan (equity) juga memperoleh skor mean yang hampir serupa, yakni 2,032, yang berarti pelaksanaan kebijakan dinilai cukup merata di berbagai wilayah. Akan tetapi, tingkat persepsi masyarakat terhadap dimensi ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup tinggi, seperti terlihat dari nilai standar deviasi sebesar 0,655, yang merupakan yang tertinggi di antara seluruh dimensi. Variabilitas ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat keragaman persepsi masyarakat terhadap sejauh mana manfaat dan beban implementasi kebijakan dirasakan secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sebagian masyarakat mungkin merasa bahwa kebijakan ini memberikan perlindungan dan ketertiban yang merata, sementara sebagian lainnya menilai masih ada ketimpangan dalam penerapan aturan dan pengawasan di lapangan, terutama antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran.

Sementara itu, dimensi responsivitas (responsiveness) memperoleh skor mean sebesar 1,919, juga berada dalam kategori “cukup baik”, dengan standar deviasi paling rendah yaitu 0,291. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat persepsi masyarakat terhadap aspek responsivitas cenderung lebih seragam atau konsisten dibandingkan dengan dimensi lainnya. Artinya, sebagian besar responden memiliki pandangan yang relatif sama bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan upaya yang cukup responsif dalam menanggapi berbagai keluhan, saran, maupun laporan masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan pesta malam. Meskipun demikian, angka ini juga mengindikasikan bahwa tingkat responsivitas tersebut masih dapat ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan dan ketepatan tanggapan terhadap laporan pelanggaran atau keluhan masyarakat yang muncul selama proses pelaksanaan kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan pesta malam di Kota Lubuk Linggau dinilai cukup baik oleh masyarakat, dengan Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) sebesar 64,51. Namun, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perbaikan, terutama pada dimensi efisiensi. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan telah berjalan sesuai arah yang benar, tetapi proses pelaksanaan dan koordinasi antar pihak terkait masih perlu dioptimalkan agar hasilnya lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat. Dengan demikian, temuan ini memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan, sistem perizinan, serta pola komunikasi publik yang diterapkan selama ini. Langkah-langkah perbaikan diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan yang berpihak pada ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bersama.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Kategori Persepsi Per Dimensi

Dimensi	Kurang Baik		Cukup Baik		Baik	
	n	%	n	%	n	%
Efektivitas	28	29.8	29	30.9	37	39.4
Efisiensi	44	46.8	44	46.8	6	6.4
Kecukupan	22	23.4	29	30.9	43	45.7
Perataan	8	8.5	80	85.1	6	6.4
Responsivitas	15	16.0	74	78.7	5	5.3

Sumber : Hasil analisis penelitian, 2025

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 2, terlihat bahwa distribusi frekuensi kategori persepsi masyarakat terhadap setiap dimensi evaluasi kebijakan menunjukkan variasi yang cukup menarik. Setiap dimensi—efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas—memiliki pola persepsi yang berbeda, yang mencerminkan beragamnya pengalaman dan pandangan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pesta Malam. Pada dimensi efektivitas, distribusi persepsi masyarakat menunjukkan proporsi yang relatif seimbang dengan 29,8% responden menilai kurang baik, 30,9% menilai cukup baik, dan 39,4% menilai baik. Pola distribusi yang merata ini mencerminkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang bervariasi terhadap sejauh mana kebijakan ini telah mencapai tujuannya dalam menjaga ketertiban dan keamanan melalui pengawasan pesta malam. Sebagian masyarakat menganggap kebijakan ini sudah berjalan sesuai sasaran, sementara sebagian lainnya menilai bahwa pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, baik dalam aspek koordinasi antar lembaga maupun konsistensi penegakan aturan. Keberagaman penilaian ini dapat mencerminkan perbedaan pengalaman langsung di lapangan, tergantung pada wilayah tempat tinggal atau tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang diatur oleh kebijakan tersebut.

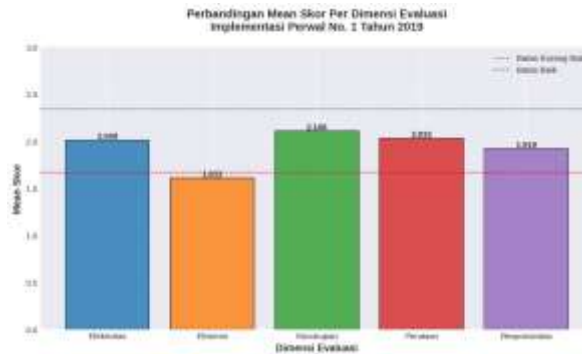
Sementara itu, dimensi efisiensi memperlihatkan pola distribusi yang cenderung terpolarisasi, dengan 46,8% responden menilai kurang baik, 46,8% menilai cukup baik, dan hanya 6,4% yang menilai baik. Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menilai proses pelaksanaan kebijakan belum efisien, baik dari segi penggunaan waktu, sumber daya, maupun mekanisme administrasi yang digunakan. Tingginya persentase penilaian “kurang baik” mengonfirmasi temuan pada analisis statistik sebelumnya yang menunjukkan bahwa dimensi efisiensi memiliki mean score terendah di antara semua dimensi. Hal ini dapat diartikan bahwa prosedur pengawasan dan perizinan terkait pelaksanaan pesta malam masih dianggap rumit, lambat, dan kurang praktis, sehingga perlu ada penyederhanaan mekanisme dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

Berbeda dengan itu, dimensi kecukupan menunjukkan distribusi yang lebih positif, di mana 45,7% responden menilai baik, 30,9% menilai cukup baik, dan 23,4% menilai kurang baik. Pola ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat menilai substansi dan isi dari peraturan sudah memadai dalam mengatur penyelenggaraan pesta malam. Hal ini menunjukkan tingkat penerimaan yang cukup tinggi terhadap isi kebijakan, yang dianggap telah mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti batas waktu penyelenggaraan, izin pelaksanaan, dan aturan keamanan. Dengan demikian, masyarakat menilai bahwa kerangka kebijakan sudah tepat secara substansial, namun pelaksanaan di lapangan masih memerlukan perbaikan agar aturan tersebut dapat diterapkan secara lebih efektif dan konsisten.

Selanjutnya, pada dimensi perataan, persepsi masyarakat tampak terkonsentrasi secara signifikan pada kategori cukup baik, yaitu sebesar 85,1%, dengan 8,5% menilai kurang baik dan 6,4% menilai baik. Dominasi pada kategori cukup baik menunjukkan adanya tingkat konsensus yang tinggi di antara responden bahwa kebijakan ini telah diterapkan secara relatif adil di berbagai lapisan masyarakat, baik dari sisi beban pelaksanaan maupun manfaat yang diterima. Namun demikian, masih adanya sebagian kecil responden yang menilai kurang baik mengindikasikan bahwa aspek pemerataan hasil dan dampak kebijakan belum sepenuhnya optimal, terutama terkait kesetaraan pengawasan dan penegakan aturan di berbagai wilayah.

Terakhir, dimensi responsivitas juga memperlihatkan pola distribusi yang serupa, dengan 78,7% responden menilai cukup baik, 13,8% menilai baik, dan 7,4% menilai kurang baik. Konsentrasi pada kategori cukup baik menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap pemerintah telah menunjukkan tingkat tanggapan yang cukup baik terhadap keluhan, saran, dan kebutuhan masyarakat terkait implementasi peraturan. Namun, hasil ini juga menegaskan bahwa tingkat responsivitas tersebut belum mencapai tingkat optimal, terutama dalam hal kecepatan respon dan tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran. Masyarakat mengharapkan adanya mekanisme pengaduan yang lebih terbuka dan cepat, agar setiap permasalahan yang muncul di lapangan dapat segera ditangani secara efektif. Secara keseluruhan, hasil distribusi frekuensi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan cenderung positif tetapi masih menyisakan ruang untuk perbaikan, terutama pada aspek efisiensi pelaksanaan dan responsivitas pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa substansi kebijakan telah diterima dengan baik oleh masyarakat, namun efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk

meningkatkan koordinasi, mempercepat proses perizinan, serta memperkuat mekanisme komunikasi publik dan pengawasan di tingkat lapanga



Gambar 1. Perbandingan Mean Skor Per Dimensi Evaluasi

Gambar 1 menampilkan visualisasi perbandingan nilai rata-rata (mean score) dari kelima dimensi yang dievaluasi dalam penelitian ini, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas. Melalui grafik tersebut, tampak dengan jelas adanya perbedaan tingkat penilaian masyarakat terhadap masing-masing dimensi implementasi kebijakan.

Secara visual, grafik menunjukkan bahwa dimensi kecukupan menempati posisi tertinggi dengan nilai mean sebesar 2,106, yang berada dalam kategori “cukup baik mendekati baik.” Hal ini menegaskan bahwa masyarakat menilai substansi dan isi kebijakan terkait penyelenggaraan pesta malam sudah cukup memadai dalam mengatur tata pelaksanaannya. Di bawahnya, dimensi perataan menunjukkan nilai mean yang juga relatif tinggi, yakni 2,032, diikuti oleh efektivitas dengan mean 2,009, serta responsivitas dengan mean 1,919. Ketiga dimensi tersebut masih berada dalam kategori cukup baik, yang menandakan bahwa pelaksanaan kebijakan dinilai berjalan dengan cukup memuaskan, meskipun belum sepenuhnya optimal di semua aspek.

Sementara itu, dimensi efisiensi menjadi satu-satunya yang memperoleh nilai mean di bawah garis referensi 1,67, yakni sebesar 1,611, yang masuk dalam kategori kurang baik. Kondisi ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa aspek efisiensi pelaksanaan kebijakan masih menjadi titik lemah utama dalam implementasi Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pesta Malam. Masalah-masalah seperti prosedur perizinan yang panjang, koordinasi antarinstansi yang kurang efektif, serta penggunaan sumber daya yang belum optimal menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya persepsi efisiensi di mata masyarakat.

Adapun garis referensi pada nilai 1,67 dan 2,34 dalam grafik berfungsi sebagai batas kategori interpretatif, yang membantu pembaca dalam memahami klasifikasi persepsi masyarakat terhadap masing-masing dimensi. Nilai mean di bawah 1,67 menunjukkan kategori “kurang baik,” sedangkan nilai antara 1,67 hingga 2,34 dikategorikan “cukup baik,” dan nilai di atas 2,34 tergolong “baik.” Dengan demikian, visualisasi ini tidak hanya menampilkan perbedaan numerik antar dimensi, tetapi juga memberikan gambaran konseptual tentang posisi relatif masing-masing aspek kebijakan berdasarkan persepsi publik.

Secara keseluruhan, Gambar 1 memberikan pemahaman cepat dan komprehensif mengenai kinerja relatif dari tiap dimensi evaluasi kebijakan. Visualisasi ini sangat membantu dalam mengidentifikasi prioritas perbaikan, di

mana efisiensi menjadi area yang paling membutuhkan intervensi segera, sedangkan kecukupan dan pemerataan dapat dipertahankan serta ditingkatkan untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif, adil, dan responsif di masa mendatang.

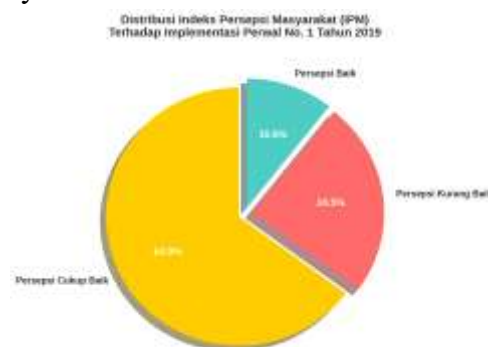
Indeks Persepsi Masyarakat

Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) merupakan indikator komposit yang dirancang untuk mengukur persepsi masyarakat secara menyeluruh terhadap implementasi kebijakan publik. Indeks ini diperoleh dengan cara mengintegrasikan kelima dimensi evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas, ke dalam satu skor tunggal. Dengan demikian, IPM tidak hanya menampilkan hasil penilaian per dimensi secara terpisah, tetapi juga memberikan gambaran holistik mengenai tingkat penerimaan dan penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pesta Malam.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) IPM adalah 64,51, dengan standar deviasi sebesar 10,51, nilai minimum 44,00, dan nilai maksimum 92,00. Variasi ini menunjukkan adanya rentang persepsi yang cukup lebar di antara responden, yang menandakan bahwa pengalaman dan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan bervariasi sesuai dengan konteks sosial dan geografis mereka. Skor 64,51 menempatkan IPM pada kategori “cukup baik” sesuai dengan skala kategorisasi yang digunakan dalam penelitian ini.

Interpretasi dari hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Kota Lubuk Linggau memiliki persepsi yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan pesta malam, terutama dalam hal substansi aturan dan kejelasan peraturan yang dinilai sudah memadai. Namun demikian, skor ini juga menegaskan bahwa masih terdapat ruang perbaikan yang cukup signifikan agar pelaksanaan kebijakan dapat mencapai kategori “baik.” Beberapa area yang memerlukan perhatian khusus adalah peningkatan efisiensi administrasi, penguatan mekanisme koordinasi antar instansi, serta optimalisasi peran komunikasi publik agar kebijakan dapat diterapkan lebih efektif dan diterima lebih luas oleh masyarakat.

Dengan demikian, nilai IPM sebesar 64,51 bukan hanya menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga menjadi tolok ukur penting bagi pemerintah daerah dalam menilai keberhasilan komunikasi publik dan efektivitas pengawasan kebijakan. Nilai ini dapat dijadikan dasar evaluatif dan strategis untuk menyusun langkah-langkah perbaikan kebijakan ke depan, sehingga implementasi Peraturan Walikota tidak hanya cukup baik, tetapi dapat berkembang menjadi praktik tata kelola kebijakan yang baik (good governance) dan berorientasi pada kepuasan serta partisipasi aktif masyarakat.



Gambar 2. Distribusi Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) Sumber: Hasil analisis penelitian, 2025

Gambar 2 menampilkan distribusi kategori Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) berdasarkan hasil penilaian dari 94 responden yang terlibat dalam penelitian ini. Visualisasi ini memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana masyarakat mengelompokkan persepsinya terhadap implementasi Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pesta Malam.

Berdasarkan hasil distribusi, terlihat bahwa mayoritas responden, yakni sebesar 64,9% atau 61 orang, berada pada kategori persepsi “cukup baik.” Proporsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai implementasi kebijakan telah berjalan dengan cukup memuaskan, meskipun belum mencapai tingkat optimal. Pandangan ini dapat diartikan bahwa kebijakan tersebut dinilai telah memberikan dampak positif dalam hal pengaturan penyelenggaraan pesta malam, penegakan ketertiban umum, serta upaya menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, namun masih terdapat berbagai kendala di lapangan yang perlu diperbaiki.

Sementara itu, sebanyak 24,5% atau 23 responden menempatkan penilaiannya pada kategori “kurang baik.” Proporsi yang hampir mencapai seperempat dari total responden ini menjadi indikator penting bahwa masih ada kelompok masyarakat yang merasa kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara efektif. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap persepsi negatif ini meliputi proses perizinan yang rumit, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, lemahnya pengawasan di tingkat pelaksana, serta inkonsistensi dalam penegakan aturan. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengalaman masyarakat terhadap kebijakan, di mana sebagian merasa kebijakan berjalan baik, sementara sebagian lainnya merasakan dampak negatif dari pelaksanaannya.

Menariknya, hanya 10,6% atau 10 responden yang menilai implementasi kebijakan dalam kategori “baik.” Persentase yang kecil ini mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan masih rendah. Dengan kata lain, meskipun secara umum kebijakan ini dianggap cukup berjalan, belum banyak masyarakat yang benar-benar puas dengan hasil implementasinya. Hal ini menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjalankan komunikasi publik, pengawasan lapangan, serta penegakan aturan perlu diperkuat agar kepercayaan masyarakat dapat meningkat.

Secara keseluruhan, distribusi pada Gambar 2 menunjukkan kecenderungan persepsi masyarakat yang berada di tingkat menengah, yaitu cukup baik, namun dengan masih adanya segmen signifikan yang kurang puas terhadap pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja implementasi masih berada pada tahap moderat, di mana arah kebijakan sudah sesuai, tetapi efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, hasil ini menjadi bahan refleksi penting bagi pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk memperbaiki aspek-aspek krusial seperti efisiensi prosedur, transparansi informasi, dan konsistensi dalam pengawasan.

Dengan memperhatikan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya substansial dan terukur untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan, sehingga proporsi persepsi masyarakat yang berada dalam kategori “baik” dapat meningkat secara signifikan pada periode mendatang.

Uji Perbandingan Antar Dimensi

Untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam persepsi masyarakat terhadap kelima dimensi evaluasi kebijakan, penelitian ini melakukan uji statistik One-Way ANOVA. Uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata (mean) dari lebih dari dua kelompok atau dimensi dalam rangka menentukan apakah perbedaan yang muncul bersifat kebetulan atau memang signifikan secara statistik.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F-statistic sebesar 14,397 dengan p-value 0,000000, yang berarti $p < 0,05$. Dengan demikian, hasil ini dapat dinyatakan sangat signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Artinya, terdapat perbedaan yang nyata dalam persepsi masyarakat terhadap masing-masing dimensi evaluasi, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas. Temuan ini menolak hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antar dimensi, dan mendukung hipotesis alternatif (H_1) bahwa perbedaan persepsi benar-benar ada dan dapat diukur secara statistik.

Interpretasi dari hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak menilai semua aspek implementasi kebijakan secara seragam. Beberapa dimensi, seperti kecukupan dan perataan, memperoleh penilaian yang lebih tinggi karena dianggap telah berjalan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Sebaliknya, dimensi efisiensi mendapatkan skor paling rendah, yang menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap aspek pelaksanaan dan tata kelola kebijakan.

Temuan ini juga memiliki implikasi praktis yang penting. Adanya perbedaan signifikan antar dimensi berarti bahwa setiap aspek kebijakan memerlukan pendekatan dan strategi perbaikan yang berbeda. Pemerintah daerah tidak dapat menggunakan satu pola kebijakan yang sama untuk seluruh dimensi, melainkan harus menyesuaikan intervensi berdasarkan karakteristik dan permasalahan spesifik masing-masing dimensi. Misalnya, peningkatan efisiensi dapat difokuskan pada penyederhanaan proses perizinan dan peningkatan koordinasi antar lembaga, sementara penguatan responsivitas dapat dilakukan dengan memperbaiki mekanisme penanganan keluhan dan memperluas saluran komunikasi publik.

Dengan demikian, hasil uji ANOVA tidak hanya memvalidasi temuan deskriptif sebelumnya, tetapi juga memperkuat argumentasi bahwa implementasi kebijakan publik bersifat multidimensional dan kompleks, di mana keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat diukur hanya dari satu aspek saja. Perbedaan signifikan antar dimensi ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan perbaikan yang lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



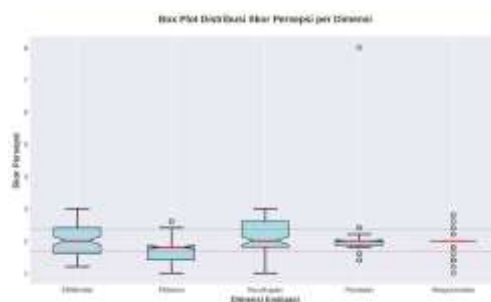
Gambar 3. Distribusi Kategori Persepsi Per Dimensi. Sumber : Hasil analisis penelitian, 2025

Gambar 3 menampilkan stacked bar chart yang menggambarkan distribusi kategori persepsi masyarakat untuk masing-masing dimensi evaluasi kebijakan. Visualisasi ini berfungsi untuk memperlihatkan perbandingan pola persepsi secara komprehensif antar dimensi, sekaligus memberikan gambaran yang lebih intuitif mengenai variasi penilaian masyarakat terhadap implementasi kebijakan. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa dimensi efisiensi memiliki proporsi kategori “kurang baik” yang paling tinggi dibandingkan dengan dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai aspek efisiensi, baik dari sisi pemanfaatan sumber daya, waktu, maupun mekanisme pelaksanaan kebijakan, masih belum optimal. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis statistik sebelumnya yang menunjukkan bahwa efisiensi memperoleh skor rata-rata terendah di antara semua dimensi.

Sebaliknya, dimensi kecukupan menunjukkan proporsi kategori “baik” yang paling tinggi, yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa implementasi kebijakan sudah cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Hal ini dapat diartikan bahwa aspek kecukupan dianggap paling berhasil dalam mengakomodasi kepentingan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, dimensi perataan dan responsivitas memperlihatkan dominasi kategori “cukup baik” yang sangat besar. Pola ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat menilai kedua dimensi tersebut berada pada tingkat menengah — artinya, kebijakan dinilai sudah berjalan relatif baik, namun masih menyisakan ruang yang signifikan untuk peningkatan. Misalnya, dalam konteks responsivitas, masyarakat mungkin merasa bahwa pemerintah sudah berusaha menanggapi kebutuhan publik, tetapi masih perlu mempercepat proses respon atau memperluas akses komunikasi publik agar lebih inklusif.

Secara keseluruhan, pola visual dalam Gambar 3 memberikan wawasan penting (insight) mengenai posisi relatif tiap dimensi dalam persepsi masyarakat. Melalui representasi grafis ini, pembuat kebijakan dapat dengan mudah mengidentifikasi dimensi mana yang memerlukan perhatian prioritas serta dimensi mana yang sudah menunjukkan kinerja relatif lebih baik. Dengan demikian, stacked bar chart ini tidak hanya berfungsi sebagai alat deskriptif, tetapi juga sebagai panduan strategis dalam merumuskan kebijakan perbaikan yang lebih terarah, spesifik, dan berbasis data (evidence-based policy).



Gambar 4. Box Plot Distribusi Skor Persepsi Per Dimensi.
Sumber: Hasil analisis penelitian

Gambar 4 menampilkan box plot yang menggambarkan distribusi skor persepsi masyarakat terhadap setiap dimensi evaluasi kebijakan, lengkap dengan informasi mengenai nilai median, kuartil, serta keberadaan outliers. Visualisasi ini

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sebaran data (spread), arah kemencengan distribusi (skewness), serta variasi tingkat persepsi antarresponden terhadap implementasi kebijakan publik.

Dari tampilan box plot, terlihat bahwa dimensi efisiensi memiliki median paling rendah dibandingkan dengan dimensi lainnya, dengan rentang (range) yang relatif sempit. Pola ini menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap efisiensi pelaksanaan kebijakan relatif seragam, namun berada pada tingkat yang rendah. Artinya, sebagian besar responden konsisten menilai bahwa pelaksanaan kebijakan masih belum efisien — baik dari segi waktu, prosedur, maupun alokasi sumber daya yang digunakan. Konsistensi persepsi yang rendah ini juga menegaskan bahwa efisiensi menjadi salah satu aspek yang paling memerlukan perhatian serius dari pihak pelaksana kebijakan.

Sementara itu, dimensi pemerataan memperlihatkan range paling lebar di antara seluruh dimensi, disertai dengan beberapa outliers pada nilai yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya variabilitas persepsi yang cukup besar di antara responden. Perbedaan tersebut dapat mencerminkan adanya variasi pengalaman langsung terhadap kebijakan — misalnya, kelompok masyarakat tertentu mungkin merasakan manfaat yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Kehadiran outliers juga mengindikasikan adanya subkelompok masyarakat yang memberikan penilaian sangat positif terhadap aspek pemerataan, meskipun sebagian besar responden menilainya cukup baik.

Adapun dimensi kecukupan menunjukkan median tertinggi dengan kuartil atas yang mencapai nilai maksimum skala penilaian. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap tingkat kecukupan (adequacy) dari substansi peraturan yang diterapkan. Dengan kata lain, masyarakat menilai bahwa aturan tersebut sudah cukup memadai dalam mengatur pelaksanaan kebijakan dan mampu menjawab kebutuhan publik secara umum.

Secara keseluruhan, box plot pada Gambar 4 memberikan perspektif statistik yang lebih komprehensif dibandingkan dengan sekadar analisis rata-rata (mean). Melalui visualisasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola penyebaran data, mendeteksi potensi masalah kualitas data (data quality issues), serta menemukan indikasi keberadaan subgrup masyarakat dengan karakteristik persepsi yang unik. Oleh karena itu, interpretasi box plot ini menjadi penting dalam konteks evaluasi kebijakan publik, karena membantu memperkuat pemahaman tentang bagaimana persepsi masyarakat bervariasi di setiap dimensi dan sejauh mana kebijakan tersebut diterima oleh berbagai kelompok masyarakat.

Pembahasan

Temuan penelitian ini memberikan insight penting tentang bagaimana masyarakat sebagai sasaran kebijakan mempersepsikan implementasi Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pesta Malam. Indeks Persepsi Masyarakat sebesar 64,51 yang masuk kategori cukup baik mengindikasikan bahwa secara keseluruhan implementasi kebijakan sudah berjalan pada level yang acceptable namun belum optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ryzin 2013) yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik dipengaruhi oleh gap antara ekspektasi dengan kinerja aktual. Dalam konteks Lubuk Linggau, meskipun kebijakan telah diimplementasikan, masyarakat masih melihat adanya ruang untuk perbaikan signifikan.

Dimensi kecukupan yang memperoleh skor tertinggi menunjukkan bahwa substansi dan konten Peraturan Walikota sudah dipersepsikan memadai oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa proses penyusunan peraturan telah mengakomodasi kebutuhan pengaturan pesta malam dengan cukup baik. Temuan ini konsisten dengan prinsip adequacy dalam kerangka (Dunn 2003) yang menekankan bahwa kebijakan harus memadai dalam menyelesaikan problem yang ditargetkan. Namun, adequacy dalam substansi peraturan tidak secara otomatis menjamin effectiveness dalam implementasi, sebagaimana digarisbawahi oleh (Pressman and Wildavsky 1973) mengenai implementation gap.

Dimensi efisiensi yang memperoleh skor terendah menjadi temuan kritis yang memerlukan perhatian serius. Rendahnya persepsi terhadap efisiensi mengindikasikan adanya permasalahan dalam aspek prosedural dan operasional implementasi kebijakan. (Arnika et al. 2024) dalam penelitiannya tentang kolaborasi antar lembaga pemerintah menemukan bahwa inefisiensi sering disebabkan oleh koordinasi yang lemah dan komunikasi yang tidak efektif antar instansi. Dalam konteks pengawasan pesta malam yang melibatkan multiple agencies seperti Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas terkait, koordinasi menjadi sangat krusial. Inefisiensi dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk seperti prosedur perizinan yang berbelit-belit, duplikasi tugas antar instansi, waktu proses yang lama, atau penggunaan sumber daya yang tidak optimal.

Dimensi efektivitas dengan skor 2,009 menunjukkan bahwa pencapaian tujuan peraturan dipersepsikan cukup baik oleh masyarakat. Namun, distribusi yang cukup merata antar kategori mengindikasikan adanya pengalaman yang beragam di kalangan masyarakat. (Anderson 2020) menekankan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari pencapaian output, tetapi juga dari persepsi stakeholder terhadap outcome yang dicapai. Dalam konteks peraturan pesta malam, efektivitas dapat dilihat dari seberapa baik peraturan berhasil menjaga ketertiban umum, mengurangi gangguan terhadap masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Variasi persepsi terhadap efektivitas mungkin mencerminkan perbedaan tingkat exposure atau proximity responden terhadap kegiatan pesta malam.

Dimensi perataan dan responsivitas yang berada pada level cukup baik dengan konsentrasi tinggi pada kategori menengah menunjukkan bahwa masyarakat menilai distribusi beban dan manfaat serta tingkat responsivitas pemerintah sudah cukup adil dan memadai, meskipun belum mencapai level optimal. (Kelly and Swindell 2002) menunjukkan bahwa perceived equity dan responsiveness merupakan determinan penting dari overall satisfaction terhadap layanan pemerintah. Dalam konteks peraturan pesta malam, equity berarti bahwa beban compliance dan benefit dari ketertiban umum terdistribusi secara adil di antara berbagai stakeholder termasuk penyelenggara acara, peserta, dan masyarakat umum. Responsiveness mencerminkan seberapa baik pemerintah merespon keluhan, memberikan klarifikasi, atau melakukan penyesuaian dalam implementasi.

Hasil uji ANOVA yang menunjukkan perbedaan signifikan antar dimensi memvalidasi bahwa setiap dimensi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam implementasinya. (Renu Patnaik and Prasad 2021) menekankan pentingnya memahami dimensi praktis dan konseptual yang berbeda dalam koordinasi implementasi kebijakan. Temuan ini memiliki implikasi praktis penting bahwa strategi perbaikan tidak dapat bersifat one-size-fits-all, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik spesifik setiap dimensi. Misalnya, perbaikan

efisiensi mungkin memerlukan reengineering proses dan penguatan sistem informasi, sementara peningkatan efektivitas mungkin memerlukan penguatan enforcement dan pengawasan lapangan.

Komunikasi publik memainkan peran sentral dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan. (James P Reynolds et al. 2020) menunjukkan bahwa komunikasi efektivitas kebijakan secara signifikan mempengaruhi dukungan publik. Dalam konteks peraturan pesta malam, komunikasi publik tidak hanya mencakup sosialisasi peraturan kepada stakeholder, tetapi juga transparansi dalam enforcement, accessibility of information mengenai prosedur perizinan, dan responsiveness dalam menangani keluhan. Rendahnya skor pada dimensi efisiensi dan responsivitas mengindikasikan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi masih memerlukan perbaikan signifikan.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoretis penting dalam konteks teori implementasi kebijakan. (Edwards III 1995) mengidentifikasi communication sebagai salah satu dari empat faktor kritis dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan dikomunikasikan dan bagaimana mekanisme komunikasi berfungsi dalam proses implementasi. (Lipsky 1980) menekankan peran street-level bureaucrats dalam implementasi, yang sangat relevan dengan konteks pengawasan pesta malam dimana petugas lapangan memiliki diskresi dalam enforcement. Kualitas komunikasi antara street-level bureaucrats dengan masyarakat sangat mempengaruhi persepsi dan compliance.

Keterbatasan penelitian ini perlu diakui untuk memberikan konteks yang tepat dalam interpretasi temuan. Pertama, penelitian menggunakan cross-sectional design yang hanya menangkap persepsi pada satu titik waktu, sehingga tidak dapat menangkap dinamika perubahan persepsi seiring waktu. Kedua, sampel purposive meskipun cukup representatif, tidak dapat sepenuhnya menghilangkan potential sampling bias. Ketiga, penggunaan self-report questionnaire dapat mengandung social desirability bias dimana responden cenderung memberikan jawaban yang dianggap socially acceptable. Keempat, penelitian ini fokus pada persepsi masyarakat dan tidak mencakup evaluasi objektif terhadap kinerja aktual implementasi kebijakan, sehingga mungkin terdapat gap antara persepsi dengan realitas objektif.

Simpulan

Penelitian ini telah berhasil mengevaluasi persepsi masyarakat Kota Lubuk Linggau terhadap implementasi Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pesta Malam melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan Dunn yang mencakup lima dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Masyarakat berada pada level 64,51 yang mengindikasikan persepsi cukup baik terhadap implementasi kebijakan secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi signifikan antar dimensi evaluasi. Dimensi kecukupan memperoleh penilaian tertinggi dengan mean 2,106, menunjukkan bahwa substansi peraturan sudah dipersepsikan memadai oleh masyarakat. Sebaliknya, dimensi efisiensi memperoleh skor terendah dengan mean 1,611, mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam aspek prosedural dan operasional implementasi yang memerlukan perbaikan prioritas.

Temuan penting lainnya adalah adanya perbedaan signifikan antar dimensi evaluasi sebagaimana ditunjukkan oleh uji ANOVA dengan F-statistic 14,397 dan p-value kurang dari 0,001. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap dimensi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam implementasinya, sehingga memerlukan strategi intervensi yang spesifik dan targeted. Distribusi kategori persepsi menunjukkan bahwa mayoritas responden atau 64,9 persen berada dalam kategori persepsi cukup baik, namun masih terdapat 24,5 persen yang menilai implementasi kurang baik, dan hanya 10,6 persen yang menilai baik. Pola ini menggarisbawahi bahwa meskipun implementasi telah berjalan, masih terdapat ruang signifikan untuk perbaikan agar dapat mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi di kalangan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan implementasi kebijakan. Pertama, perlu dilakukan reengineering prosedur perizinan untuk meningkatkan efisiensi dengan menyederhanakan tahapan, mempersingkat waktu proses, dan mengimplementasikan sistem perizinan elektronik yang terintegrasi. Kedua, penguatan koordinasi antar instansi terkait melalui pembentukan task force atau tim koordinasi yang bertemu secara rutin untuk memastikan sinkronisasi dalam pengawasan dan enforcement. Ketiga, intensifikasi program sosialisasi dan komunikasi publik melalui berbagai media dan channel untuk memastikan bahwa informasi mengenai peraturan, prosedur, dan mekanisme pengawasan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh stakeholder.

Keempat, pengembangan sistem pengaduan dan feedback mechanism yang responsif dan accessible untuk memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Kelima, penguatan kapasitas street-level bureaucrats melalui pelatihan berkala mengenai teknik komunikasi, customer service, dan penanganan konflik untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan masyarakat. Keenam, implementasi monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja implementasi kebijakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan akuntabilitas dan continuous improvement. Ketujuh, pengembangan dashboard atau sistem informasi publik yang menyajikan data transparan mengenai jumlah perizinan, pelanggaran, dan enforcement actions untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Studi longitudinal juga akan sangat bermanfaat untuk menangkap dinamika perubahan persepsi seiring dengan perubahan dalam implementasi kebijakan. Perbandingan dengan kota lain yang memiliki peraturan serupa dapat memberikan benchmark dan best practices yang dapat diadaptasi. Akhirnya, evaluasi objektif terhadap kinerja aktual implementasi kebijakan perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi atau membandingkan dengan temuan persepsi masyarakat, sehingga dapat diidentifikasi area dimana terdapat gap antara persepsi dengan realitas objektif. Dengan implementasi rekomendasi ini secara konsisten dan terkoordinasi, diharapkan efektivitas komunikasi publik dan implementasi Peraturan Walikota tentang Pesta Malam dapat ditingkatkan sehingga tujuan kebijakan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 2020. *Public Policymaking: An Introduction*. 8th ed. Cengage Learning.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.
- Arnika, Mita, Rifdan Rifdan, Muhammad Makka Arief, A Abd waris Halid, Andi Taufik, and Sry Hasrini. 2024. "Collaboration Between Government Agencies: Challenges and Opportunities in Public Policy Implementation." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 14(2): 577. doi:10.26858/jiap.v14i2.67934.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Public Policy Analysis: An Introduction*. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Edwards III, George C. 1995. *The British Civil Service Implementing Public Policy*. doi:10.1007/978-1-349-15026-7_5.
- Hill, Michael, and Peter Hupe. 2021. *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance*. 4th ed. SAGE Publications.
- James, Oliver. 2011. "Managing Citizens' Expectations of Public Service Performance: Evidence from Observation and Experimentation in Local Government." *Public Administration* 89(4): 1419–35. doi:10.1111/j.1467-9299.2011.01962.x.
- Kelly, Janet M., and David Swindell. 2002. "A Multiple-Indicator Approach to Municipal Service Evaluation: Correlating Performance Measurement and Citizen Satisfaction across Jurisdictions." *Public Administration Review* 62(5): 610–12.
- Lipsky, Michael. 1980. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mazmanian, Daniel A., and Paul A. Sabatier. 1984. "Implementation and Public Policy." *CrossRef Listing of Deleted DOIs* 14(4): 159. doi:10.2307/3330197.
- Patnaik, Ramesh, and Raj Kishore Prasad. 2021. "Organizational Coordination in Public Policy Implementation: Practical Dimensions and Conceptual Elements." *Central European Journal of Public Policy* 44(7): 585–98.
- Patnaik, Renu, and R K Prasad. 2021. "Organizational Coordination in Public Policy Implementation: Practical Dimensions and Conceptual Elements." *Central European Journal of Public Policy* 15(1): 47–57. doi:10.2478/cejpp-2021-0004.
- Patton, Michael Quinn. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. 4th ed. SAGE Publications.
- Pressman, Jeffrey L, and Aaron Wildavsky. 1973. *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.
- Reynolds, J. P., K. Stautz, M. Pilling, S. van der Linden, and T. M. Marteau. 2020. "Communicating the Effectiveness and Ineffectiveness of Government Policies and Their Impact on Public Support: A Systematic Review with Meta-Analysis." *Royal Society Open Science* 7(1). doi:10.1098/rsos.190522.
- Reynolds, James P, K Stautz, M Pilling, S van der Linden, and Theresa M Marteau. 2020. "Communicating the Effectiveness and Ineffectiveness of Government

- Policies and Their Impact on Public Support: A Systematic Review with Meta-Analysis.” *Royal Society Open Science* 7(1): 190522. doi:10.1098/rsos.190522.
- Rossi, Peter H., Mark W. Lipsey, and Howard E Freeman. 2004. *Evaluation: A Systematic Approach*. SAGE Publications.
- Ryzin, Gregg G. Van. 2013. “An Experimental Test of the Expectation-Disconfirmation Theory of Citizen Satisfaction.” *Journal of Policy Analysis and Management* 32(3): 597–614.
- Ryzin, Gregg G Van. 2006. “Testing the Expectation Disconfirmation Model of Citizen Satisfaction with Local Government.” *Journal of Public Administration Research and Theory* 16(4): 599–611.
- Stufflebeam, Daniel L., and Chris L. S. Coryn. 2014. *Evaluation Theory, Models, and Applications*. Jossey-Bass.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vedung, Evert. 2017. *Public Policy and Program Evaluation*. 2nd ed. Routledge.
- Winter, Søren. 2012. “Implementation Perspectives: Status and Reconsideration.” In *The SAGE Handbook of Public Administration*, eds. B Guy Peters and Jon Pierre. SAGE Publications, 265–78.